



as-Shahifah:

Journal of Constitutional Law and Governance, Vol. 5 No. 1 2025: (page 100-112)

ISSN: 2829-4246, E-ISSN: 2829-6206

DOI: <http://doi.org/10.19105/asshahifah.v5i1.19641>

PERAN BADAN PEMEKRIKSA KEUANGAN DALAM MENJAMIN TRANSPARASI POLITIK ANGGARAN

Darma Rizki Maulana

Program Studi hukum tata Negara, LAIN Madura

Email: Darmarizki99@gmail.com

Nur Laelatul Qomaria

Program Studi Hukum Tata Negara, LAIN Madura

Email: nurlaelatulqoariya@gmail.com

Sintiyana

Program Studi Hukum Tata Negara, LAIN Madura

Email: tikensintian@gmail.com

Widianti nor Nabila

Program Studi Hukum Tata Negara, LAIN Madura

Email: widiantinornabila29.12@gmail.com

Abstract

The Supreme Audit Agency (BPK) plays a strategic role in supervising the use of state finances. This article analyzes BPK's function in ensuring budget transparency and accountability in the political budgeting process. By employing a juridical-normative approach, this study evaluates the effectiveness of BPK audits in curbing budget misuse. The findings reveal that although BPK provides periodic audit opinions, the follow-up actions by political institutions are often limited. There is a need to strengthen the authority of BPK in enforcing its findings and to link audit outcomes with budget formulation and political sanctions.

Keywords: BPK ,budget transparency, fiscal audit, political accountability

Author correspondence email: email_penulisi@gmail.com

Available online at: <http://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/asShahifah/>

Copyright (c) 2025 by as-Shahifah. All Right Reserved

Abstrak

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memiliki peran strategis dalam mengawasi penggunaan keuangan negara. Artikel ini mengkaji fungsi BPK dalam menjamin transparansi dan akuntabilitas anggaran dalam proses politik penganggaran. Dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif, penelitian ini menilai sejauh mana efektivitas audit BPK dalam menekan penyalahgunaan anggaran. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun BPK secara rutin memberikan opini hasil pemeriksaan, tindak lanjut dari lembaga politik masih sangat terbatas. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kewenangan BPK dalam menegakkan hasil auditnya serta integrasi antara temuan audit dengan penyusunan anggaran dan penerapan sanksi politik.

Kata kunci: BPK, transparansi anggaran, audit fiscal, akuntabilitas politik

Pendahuluan

Politik anggaran merupakan langkah strategis dalam merancang dan mengelola anggaran negara yang berperan penting dalam menentukan arah pembangunan nasional serta pemanfaatan sumber daya publik. Dalam pelaksanaannya, politik anggaran melibatkan berbagai pihak dengan beragam kepentingan, seperti eksekutif, legislatif, dan lembaga pengawas. Hal ini menjadikan prosesnya cukup kompleks dan berpotensi menimbulkan penyimpangan serta ketidakefisienan dalam pengelolaan keuangan negara. Oleh karena itu, penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas menjadi hal yang sangat penting guna memastikan bahwa dana publik digunakan secara tepat dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.¹

Dalam hal ini, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menjalankan fungsi sebagai lembaga negara yang independen dengan mandat untuk memeriksa, mengawasi, dan mengevaluasi pengelolaan keuangan negara. BPK memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan opini atas laporan

¹ Dwi Ratmono, "Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Keuangan Negara" *Jurnal Administrasi*

Darma Rizki Maulana

Peran Badan Pemeriksaan Keuangan Dalam Menjamin transpaeasi politik anggaran

Public No.1 (2020:445)

3 **As-Shahifah:** Journal of Constitutional Law and Governance, Vol. 5 (1), 2025: 100-
As-Shahifah: Journal of Constitutional Law and Governance, Vol. 5 (1), 2025: 100-112

keuangan pemerintah sebagai wujud akuntabilitas kepada publik.² Kendati BPK secara berkala mengungkap hasil audit dan temuan terkait penyimpangan anggaran, implementasi tindak lanjut atas temuan tersebut masih menghadapi berbagai hambatan, terutama yang berkaitan dengan respons politik dari lembaga legislatif maupun aparat penegak hukum.³

Terulangnya berbagai bentuk penyimpangan anggaran setiap tahun, seperti pengadaan fiktif, inflasi harga, dan penyelewengan dana hibah daerah, mencerminkan lemahnya sistem pengawasan dan akuntabilitas yang ada. Kondisi ini memunculkan pertanyaan penting mengenai sejauh mana efektivitas dan peran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam menjamin transparansi dalam politik anggaran serta mendorong tanggung jawab dari lembaga-lembaga negara.⁴ Di sisi lain, dinamika politik di DPR yang kerap diwarnai oleh kompromi turut menjadi faktor penghambat utama dalam upaya penegakan akuntabilitas anggaran.⁵

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi peran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam proses politik anggaran, dengan menitikberatkan pada keterkaitan antara temuan audit BPK dan respons politik maupun hukum dari lembaga-lembaga yang berwenang.⁶ Melalui pendekatan yuridis-normatif serta telaah terhadap laporan hasil pemeriksaan BPK, studi ini diharapkan mampu menggambarkan tingkat efektivitas peran BPK dan menawarkan

² Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, *Iktisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2022*, (Jakarta: BPK RI, 2023), 6..

³ Bivitri Susanti, "Tantangan Penegakan Hukum Atas Temuan BPK," *Jurnal Konstitusi* 14, No.2 (2017):215

⁴ Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia, *Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2022* (Jakarta: BPK RI, 2023), 12.

⁵ Syamsuddin Haris, "Politik Anggaran Dan Korupsi Di Parlemen," *Jurnal Antikorupsi*

4 **As-Shahifah:** Journal of Constitutional Law and Governance, Vol. 5 (1), 2025: 100-

As-Shahifah: Journal of Constitutional Law and Governance, Vol. 5 (1), 2025: 100-112

Integritas, No. 1 (2018): 56

⁶ Arif Nur Alam, “Urgensi Penguatan Peran BPK Dalam Mewujudkan Transparasi Keuangan Negara,” *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, No.3 (2020):509

rekomendasi strategis guna memperkuat kapasitas kelembagaan serta meningkatkan koordinasi antara lembaga pengawas dan legislatif.⁷

Oleh karena itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perbaikan sistem pengawasan keuangan negara yang lebih optimal, dalam rangka memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan anggaran negara serta mendorong terciptanya pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.⁸

Metode

Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan konseptual dan komparatif. Data diperoleh dari ketentuan perundang-undangan yang mengatur kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK periode 2019–2023, serta kajian literatur ilmiah. Analisis difokuskan pada keterkaitan antara hasil temuan audit BPK dan respons politik dari DPR maupun tindakan lanjutan oleh aparat penegak hukum.

Hasil dan Pembahasan

Setiap tahunnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyusun Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas laporan keuangan pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta berbagai lembaga negara lainnya. Laporan ini menjadi alat penting bagi DPR, DPD, dan DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasan. Namun demikian, efektivitas LHP BPK dalam meningkatkan akuntabilitas masih dinilai rendah dalam praktiknya. Meskipun sejumlah kementerian dan lembaga memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), hal tersebut tidak serta-merta menandakan

⁷ Eka Nurfalih, "Efektivitas Audit BPK Dalam Pengawasan Anggaran Negara : Studi Atas Tindak Lanju Temuan," *Jurnal Ilmu Pemerintahan* No,1 (2023):75

⁸ Kementerian Keuangan Republic Indonesia, *Strategi Nasional Pencegahan Korupsi 2021-2022* (Jakarta : Kemenkeu RI, 2022), 17

6 **As-Shahifah:** *Journal of Constitutional Law and Governance*, Vol. 5 (1), 2025: 100-112
As-Shahifah: *Journal of Constitutional Law and Governance*, Vol. 5 (1), 2025: 100-112

tidak adanya penyimpangan. Berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) BPK Tahun 2022, terungkap adanya potensi kerugian negara mencapai triliunan rupiah akibat belanja yang tidak sesuai ketentuan, lemahnya pengendalian internal, dan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan.⁹

Masalah utama yang dihadapi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bukan pada kemampuan mereka dalam melakukan audit, melainkan pada rendahnya tindak lanjut terhadap rekomendasi hasil pemeriksaan. Berdasarkan data BPK, rata-rata penyelesaian tindak lanjut hanya mencapai sekitar 70–75% setiap tahun, dan sebagian besar berupa penyelesaian administratif saja. Kondisi ini menggambarkan bahwa fungsi pengawasan belum memiliki kekuatan eksekusi yang memadai, terutama ketika berhadapan dengan entitas yang memiliki pengaruh politik atau hubungan dengan elit penguasa. Akibatnya, banyak temuan audit tidak diikuti dengan pemulihan kerugian negara maupun penegakan hukum yang efektif.¹⁰

Selain itu, dalam ranah politik anggaran, netralitas Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kerap menjadi bahan kritik. Meskipun secara resmi BPK merupakan lembaga yang independen, proses pemilihan anggota BPK oleh DPR membuka peluang terjadinya kompromi politik. Tidak jarang calon anggota BPK memiliki afiliasi partai politik atau hubungan dekat dengan tokoh politik tertentu. Kondisi ini menimbulkan keraguan terhadap independensi BPK dalam melakukan audit, terutama terhadap entitas yang memiliki hubungan politik dengan anggota BPK tersebut. Dalam sistem seperti ini, sulit mengharapakan fungsi pengawasan terhadap kebijakan

⁹ Rahmawati, P, Sari &.”Transparasi dan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Anggaran Negara.” *Jurnal Politik Dan Pemerintahan UIGM*, Vol.5, No. 2, 2021.

7 **As-Shahifah:** *Journal of Constitutional Law and Governance*, Vol. 5 (1), 2025: 100-112
As-Shahifah: *Journal of Constitutional Law and Governance*, Vol. 5 (1), 2025: 100-112

¹⁰ Raba', Mike Rayu. "Peran Badan Pemeriksa Keungan (BPK) Dalam Pemeriksaan Terhadap Pengelolaan Keuangan Negara Menurut UU No.15 Tahun 2006." *Jurnal Hukum dan Pemerintahan*, Vol 2, No. 1, 2017.

anggaran yang sarat kepentingan politik dapat berlangsung secara objektif dan bebas dari tekanan.¹¹

Situasi tersebut semakin diperburuk oleh kurangnya koordinasi yang efektif antar lembaga negara. Temuan dari BPK sering kali tidak dijadikan acuan dalam penyusunan anggaran pada tahun berikutnya. Meskipun laporan BPK dibahas dalam rapat-rapat DPR, pembahasan tersebut cenderung bersifat administratif dan jarang menghasilkan keputusan politik yang signifikan. Integrasi antara hasil audit dengan siklus perencanaan anggaran pun belum berjalan secara sistematis. Selain itu, lembaga penegak hukum belum memanfaatkan hasil audit secara optimal dalam proses penyelidikan. Walaupun BPK memiliki kewenangan untuk melaporkan dugaan tindak pidana kepada aparat penegak hukum, dalam praktiknya koordinasi dan tindak lanjut atas laporan tersebut masih sangat kurang.

Untuk meningkatkan efektivitas Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam menjamin transparansi anggaran, diperlukan serangkaian reformasi kelembagaan. Pertama, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK perlu direvisi agar memberikan kewenangan yang lebih besar dalam penerapan sanksi administratif terhadap pihak-pihak yang mengabaikan rekomendasi audit. Kedua, kemampuan investigasi auditor BPK harus diperkuat supaya mampu mendeteksi lebih awal potensi korupsi dan penyimpangan dalam pengelolaan fiskal. Ketiga, mekanisme pemilihan anggota BPK perlu direformasi agar berjalan secara lebih transparan dan bebas dari pengaruh partai politik, misalnya dengan membentuk panitia seleksi independen yang melibatkan kalangan akademisi dan masyarakat sipil.¹²

¹¹ Elisa, Syamsul Alam, And Liwaul. "Peran Badan Pemeriksa Keuangan Dalam Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan Negara." *Jurnal Administrasi Negara, Politik Pemerintah & Hubungan Internasional*, Vol , No 1, 2023.

¹² H. Nugroho. "Evaluasi Badan Pemeriksa Keuangan Dalam Pengawasan Anggaran." *Jurnal Akuntansi Publik*, Vol.3, No. 2, 2020.

Dengan penerapan langkah-langkah tersebut, diharapkan peran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam politik anggaran tidak sekadar formalitas, melainkan benar-benar menjadi alat kontrol yang efektif terhadap pengelolaan fiskal pemerintah. Integritas dan efektivitas BPK bukan hanya berkaitan dengan aspek teknis audit, melainkan juga mencerminkan kualitas demokrasi fiskal serta tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan negara.¹³

Kesimpulan

Sebagai lembaga independen, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memainkan peran penting dalam mengawasi pengelolaan keuangan negara melalui kewenangannya melakukan audit secara menyeluruh. Melalui audit keuangan, audit kinerja, dan audit investigatif, BPK berperan dalam mengungkap penyimpangan serta potensi kerugian negara yang timbul dalam dinamika proses politik anggaran

Walaupun BPK memiliki peran krusial dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam politik anggaran, efektivitasnya masih terkendala oleh sejumlah tantangan serius. Respons terhadap temuan audit oleh lembaga legislatif maupun aparat penegak hukum sering kali kurang maksimal, disebabkan oleh pengaruh dinamika politik dan lemahnya sinergi antar lembaga. Di sisi lain, proses politik di DPR yang cenderung mengedepankan kompromi dan kepentingan kelompok, serta minimnya kolaborasi dengan aparat penegak hukum, turut berkontribusi pada lemahnya penegakan akuntabilitas terhadap penyalahgunaan anggaran.

Oleh karena itu, diperlukan penguatan kelembagaan BPK, baik dari segi kewenangan maupun sumber daya, agar hasil audit yang dihasilkan tidak hanya berakhir sebagai dokumen formal, tetapi juga memiliki daya dorong dalam ranah politik dan hukum. Sinkronisasi yang lebih efektif antara temuan BPK dengan proses perencanaan anggaran serta penerapan sanksi

1 **As-Shahifah:** Journal of Constitutional Law and Governance, Vol. 5 (1), 2025: 100-112
As-Shahifah: Journal of Constitutional Law and Governance, Vol. 5 (1), 2025: 100-112

¹³ Ningsih, K.S., Dan Frinaldi, A.,. “Pengaruh Menejemen Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Di Indonesia.” *Jurnal Birokrasi dan Pemerintahan Daerah*, Vol.6, No. 1, 2023

politik dan hukum akan memperkuat fungsi pengawasan dan mendorong terciptanya tata kelola keuangan negara yang lebih transparan dan akuntabel

Penguatan kolaborasi antara BPK, DPR, KPK, dan institusi penegak hukum lainnya menjadi langkah strategis untuk memastikan bahwa temuan audit dapat segera dan tepat ditindaklanjuti. Dengan demikian, peran BPK tidak terbatas pada pemberian opini semata, tetapi juga menjadi penggerak utama dalam membangun budaya pengelolaan anggaran yang transparan dan bebas dari korupsi, demi mendukung kemajuan negara dan meningkatkan kesejahteraan Masyarakat

Daftar Pustaka

- Elisa, Syamsul Alam , and Liwaul. "Peran Badan Pemeriksa Keuangan Dalam Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan Negara." *Administrasi Negara, Politik Pemerintah & Hubungan Internasional*, 2023.
- H.Nugroho. "Evaluasi Badan Pemeriksa Keuangan Dalam Pengawasan Anggaran." *Akuntansi Publik*, 2020.
- Ningsih, K S., Frinaldi, A. "Pengaruh Manajemen Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Indonesia." *Birokrasi dan Pemerintahan Daerah*, 2023.
- Prasetyo, E. "Lembaga Pengawas Keuangan Dalam Mecegah Korupsi." *Jurnal Ilmu Administrasi*, 219.
- Prasetyo, E. "Sinergi Lembaga Pengawas Keuangan dalam Mencegah Korupsi." *Ilmu Administrasi*, 2019.
- Preasetyo, E. "Lembaga Pengawas Keuangan Republik Indonesia (BPK RI)." 2019.
- Raba', Mike Rayu. "peran badan pemeriksaan (BPK) dalam melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan negara untuk

1 **As-Shahifah:** Journal of Constitutional Law and Governance, Vol. 5 (1), 2025: 100-112
As-Shahifah: Journal of Constitutional Law and Governance, Vol. 5 (1), 2025: 100-112

- mewujudkan pemerintahan yang baik menurut UU No. 15 tahun 2006." 2017.
- Rahmawati, P.Sari &. "Transparasi Dan kuntabilitas Dalam Pengelolaan Anggaran Negara." *Politik Dan Pemerintahan*, 2021: UIGM.
- Ratmono,Dwi "Transparasi dan Akuntabilitas Dalam Penegakan Keuangan Negara" *Jurnal Administrasi Publik*, No 1 (2020): 40-52.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, *Iktisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS)II Tahun 2022*.Jakarta:BPK RI, 2023.
- Susanti,Bivitri, "Tantangan Penegakan Hukum Atas Temuan BPK." *Jurnal Konstitusi* No.2 (2017): 210-225.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, *Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2022*. Jakarta:BPK RI 2023.
- Haris ,Syamsuddin. "Politik Anggaran dan Korupsi di Parlemen." *Jurnal Antikorupsi Integritas* , No.1 (2018): 45-60.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *Strategi Nasional Pencegahan Korupsi 2021-2022*, Jakarta: Kemenkeu RI, 2022.
- Arif Nur Alam, "Urgensi Penguatan Peran BPK Dalam Mewujudkan Transparasi Keuangan Negara, " *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, No.3 (2020):509.
- Eka Nurfalah, "Efektivitas Audit BPK Dalam Pengawasan Anggaran:Studi Atas Tindak Lanjut Temuan, " *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, No.1 (2023)75